

# J24022116208

*by* Fekon Uniga

---

**Submission date:** 03-Aug-2023 07:20AM (UTC+0100)

**Submission ID:** 2140728217

**File name:** isis\_Realisasi\_Anggaran\_Pendapatan\_dan\_Belanja\_Daerah\_Kab-1.docx (596.13K)

**Word count:** 4232

**Character count:** 29493

6

## ANALISIS REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GARUT

Elsa Silviani Dewi<sup>1</sup>; Marti Dewi Ungkari<sup>2</sup>; Uu Suparman<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Garut

[24022116208@fekon.uniga.ac.id](mailto:24022116208@fekon.uniga.ac.id)

<sup>2</sup> Universitas Garut

[martidewiungkari@uniga.ac.id](mailto:martidewiungkari@uniga.ac.id)

<sup>3</sup> Universitas Garut

[uusuparman@uniga.ac.id](mailto:uusuparman@uniga.ac.id)

### Abstrak

Kriteria penerimaan Peraturan Garut terhadap pendapatan negara dan rencana pengeluaran konsumsi menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini. Dalam ulasan ini, kami menggunakan sumber primer yang penting. Data kunci yang digunakan memberikan gambaran tentang Pedoman Pengesahan Rancangan Keuangan Negara Pedoman Garut Tahun 2016-2019. Prosedur yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi emosional dengan metodologi analisis yang memikat. Pengumpulan data terdiri dari studi kepustakaan, pemeriksaan catatan, dan temu. Metode ini menggunakan model Miles dan Huberman untuk tipe data kualitatif seperti reduksi informasi, penyajian informasi, dan terminasi untuk analisis deskriptif. Konsekuensi survei tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepraktisan pengesahan rencana konsumsi gaji di organisasi Garut tahun 2016-2019 dinilai berhasil. Hal ini dibuktikan dengan terus berkembangnya pengakuan pendapatan negara dan rencana pemanfaatan organisasi Garut. Karena rendahnya asimilasi rencana keuangan langsung dan menyimpang serta tidak adanya harmonisasi konsumsi provinsi, maka tingkat produktivitas pengakuan rencana belanja penggunaan di Kabupaten Garut periode 2016-2019 dinilai rendah.

6

**Kata kunci: Realisasi, Anggaran, Pendapatan Daerah, Belanja Daerah.**

### ABSTRACT

*The investigation into the approval of the Garut administration's territorial wage and consumer finance plans is the focus of this one. The 2016-2019 Garut He Regency Regional Budget Implementation Report serves as the primary data source for this study. The system utilized in this study is an emotional strategy with a particular examination approach, data gathering, particularly library research, record exploration, and pondering. The Miles and Huberman models are used for qualitative data types like information decline, information presentation, and termination in this method of descriptive analysis. This outcome demonstrates that the level of achievability of acknowledgment of pay consumption plans in the 2016-2019 Garut organization is viewed as effective. This is proven by the constantly growing acknowledgment of the Garut Rule's Regional Pay Monetary Arrangement. The fiscal plan of the Garut administration from 2016 to 2019 is regarded*

*as less effective. This is reflected in the low consistency standard of prompt grave spending plans, prompting local spending errors.*

**Keywords:** *Realization, Budget, Regional Revenue, Regional Expenditure.*

## 1 Pendahuluan

Telah terjadi perpindahan tenaga ahli organisasi pemerintahan dari pemerintah pusat ke daerah provinsi di Indonesia sejak kemerdekaan daerah tercapai. Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. "Kemerdekaan daerah berarti kekuasaan wilayah yang berdikari untuk mengatur dan mengawasi kepentingan BUMN dan daerah sekitarnya dalam mengatur negara kesatuan Republik Indonesia," menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. dan tanggung jawab. Struktur tanggung jawab daerah untuk alokasi anggaran pemerintah daerah berubah sebagai akibat dari otonomi daerah. Di bawah kerangka independensi lokal, mereka dapat mengelola dana mereka sepenuhnya dan melakukan tugas tak terbatas yang diharapkan dari negara bagian setempat, seperti pengaturan anggaran. Oleh karena itu, legislatif lokal harus dapat mengalihkan bantuan perencanaan keuangan sehubungan dengan bagaimana pengeluaran negara digunakan.

Rencana pengeluaran adalah pengaturan moneter untuk apa yang akan datang, dikomunikasikan secara tunai, untuk segera dilaksanakan. Dalam afiliasi ruang terbuka, pengaturan pengeluaran merupakan perangkat penting dengan rasa tanggung jawab tinggi yang berasal dari pengawasan cadangan pemerintah dan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang disponsori oleh area publik (Mardiasmo, 2018). Sesuai dengan Standar Pembukuan Pemerintah Indonesia, sambil menyiapkan rencana pengeluaran, legislatif lokal harus menyusun strategi dan menyajikan rencana pengeluaran dengan cara yang dapat digunakan dan tidak mengherankan untuk apa yang akan datang. Anggaran dikatakan kompeten jika akurat, rapi, dan dibuat dengan alokasi yang jelas, berdasarkan kebutuhan, dan dikelola dengan baik. Sebelum memulai perencanaan ini, penting untuk memutuskan apakah itu benar-benar mendasar dan menguntungkan untuk masa kini dan masa depan. Setiap perkembangan dan tindakan sederhana karena dilakukan dengan cara yang sah dan terbuka, menggunakan pengaturan keuangan yang benar-benar masuk akal dan signifikan. Untuk memulai membuat rencana belanja, langkah mendasar dimulai dengan membuat Rencana Pembayaran dan Penggunaan Negara (APBD). Laporan Pengesahan Pengaturan Moneter adalah laporan yang berisi informasi persiapan yang berkaitan dengan angsuran material, penggunaan dan pengesahan konsumsi, menonjol dari tiga hal (Mahsun, 2016:120). Laporan konfirmasi pengaturan keuangan juga berisi informasi yang menunjukkan apakah aset telah digunakan sesuai standar ekonomi, manfaat dan efisiensi, sesuai rencana bermain yang ditata dan sesuai dengan pedoman dan strategi penting. meningkatkan. Endah (2015) menyatakan, "Memanfaatkan proporsi produktivitas terhadap pelaksanaan untuk mengukur pelaksanaan suatu perusahaan mengevaluasi distribusi aset untuk pengembangan dan proyek yang menggunakan sumber daya tanpa cacat keuangan. ." Menerima bahwa uang digunakan dengan sengaja dan bahwa tujuan (benar-benar) layak, kita dapat secara positif membahas batas (dana cadangan).

Moneter dan Sumber Daya Daerah Badan Pelaksana Tugas (BPKAD) Peraturan Garut merupakan salah satu dinas yang mengawasi dana dan sumber daya di Rezim Garut. Rencana keuangan dan pengakuan gaji provinsi untuk Rezim Garut 2016-2019 bahwa pengakuan gaji wilayah untuk Peraturan Garut belum tercapai secara ideal. Hal ini karena belanja anggaran baik langsung maupun tidak langsung belum dimanfaatkan secara maksimal. Rendahnya retensi anggaran tersebut karena masih banyak pemerintah provinsi di Perda Garut yang enggan mengakui belanja daerah karena batas set yang tidak ideal. Selain itu, tidak adanya keselarasan belanja daerah akibat isu keselarasan belanja tidak langsung yang lebih besar dari belanja langsung. Kemudian pada tahun 2016 penggunaan APBD provinsi lebih menonjol dari pengakuan yang disampaikan, tepatnya 91%, sehingga untuk tahun 2016-2019 angka tersebut tidak mencapai 95%.

Temuan penelitian yang dilakukan oleh Dien et al. (2015: 534) menemukan bahwa pelaksanaan keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap penggunaan pengakuan rencana keuangan

moneter. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah akan meningkat sebanding dengan seberapa efektif dan efisien penggunaan anggaran dan belanja daerah. Sementara itu, ahli lain menemukan bahwa eksekusi uang belum efektif, hal ini dapat dilihat dari jumlah yang diakui lebih kecil dibandingkan dengan apa yang direncanakan. Anggaran sederhana yang telah direalisasikan dari anggaran mendukung efisiensi kinerja belanja pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus menghemat uang, meningkatkan PAD, dan mengurangi pengeluaran (Daling, 2013: 82).

Mengingat keanehan yang diungkapkan di atas, pencipta tertarik untuk mengarahkan eksplorasi dengan judul tersebut **“Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut”**.

## 29 2 Tinjauan Pustaka

### 2.1 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Informal Undang-undang No. arah dan menunjukkan tanggung jawab staf yang pasti mengenai sumber daya yang digunakan bersama oleh:

1. Menyajikan informasi tentang sumber daya, kewajiban, dan nilai moneter pemerintah.
  2. Menampilkan informasi tentang perubahan tempat keseluruhan sumber daya, kewajiban dan modal pemerintah.
  3. Data tentang sumber, distribusi, dan pemanfaatan sumber daya ekonomi disajikan.
  4. Berikan data tentang seberapa baik persetujuan rencana pengeluaran diikuti.
  5. menjelaskan bagaimana memenuhi persyaratan pendanaan dan likuiditas entitas pelapor.
  6. Memberikan informasi mengenai dukungan organisasi terhadap kegiatan pemerintahan.
- Sajikan informasi penting untuk mensurvei kemampuan zat cerdas untuk mensubsidi praktik

### 2.2 Fungsi Anggaran

Komponen fundamental pengaturan moneter yang diperkenalkan oleh Mardiasmo (2018:63-66) adalah:

1. Sebagai alat desain digunakan perencanaan keuangan
2. Rencana pengeluaran digunakan sebagai instrumen administrasi
3. Untuk strategi keuangan keempat, alat yang disebut rencana pengeluaran digunakan.
4. Rencana moneter digunakan sebagai instrumen politik
5. Rencana pengeluaran berfungsi sebagai alat untuk perubahan dan reaksi (perubahan dan
6. Presentasi dapat diperkirakan dengan menggunakan anggaran.
7. Pengaturan keuangan digunakan sebagai sumber motivasi
8. Rencana pengeluaran untuk perencanaan ruang publik

### 2.3 Jenis-Jenis Anggaran Sektor Publik

Rencana keuangan Mardiasmo antara lain sebagai berikut (2018:71):

1. Rencana pengeluaran fungsional adalah rencana pengeluaran yang digunakan untuk merancang kebutuhan pemerintah yang digunakan setiap hari untuk menyelesaikan berbagai prakarsa dan proyek yang dibiayai oleh pembayar pajak. Dalam anggaran operasional, hanya beban berulang atau operasional yang digunakan hanya satu tahun dan berulang setiap tahunnya yang mengurangi kekayaan negara. pemanfaatan yang bermanfaat. terdiri dari dukungan, aktivitas, dan penggunaan organisasi.
2. Rencana keuangan modal adalah rencana keuangan yang memuat berbagai rencana kerja jangka panjang dan kegunaannya, misalnya: pengeluaran untuk pabrik, mesin, dan peralatan yang manfaatnya melampaui periode anggaran. Karena badan legislatif terlibat dalam pemilihan umum yang dipilih, pengeluaran pemerintah diharapkan untuk membantu proyek dan kegiatan yang dapat menawarkan jenis bantuan dan manfaat bagi jaringan. Pemanfaatan modal menggabungkan pemanfaatan dan hipotesis aset tetap.

## 2.4 Unsur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Sesuai Mardiasmo (2018:15), APBD terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut:

1. Rencana pemindahan lokasi dan representasi detailnya;
2. Anda memiliki jenis pendapatan yang peran dasarnya adalah untuk menangani pengeluaran yang terkait dengan giliran Anda, dan Anda memiliki cadangan yang tersedia untuk menangani pengeluaran tersebut sebanyak mungkin.
3. Macam-macam usaha dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir
4. Jangka waktu rencana pengeluaran biasanya satu tahun. Sebagai instrumen pemerintahan, rencana keuangan area publik memenuhi kebutuhan yang berbeda dan menempatkan roda pemerintahan dan perbaikan ke posisi yang tinggi.

## 2.5 Laporan Realisasi Anggaran

Informasi tentang pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus dan defisit, dan pengakuan dana disajikan dalam laporan pengakuan rencana pengeluaran ini. Siregar (2017:117) mengemukakan bahwa "Laporan Pelaksanaan Penataan Moneter adalah laporan yang memberikan garis besar tentang permulaan, tujuan dan penggunaan sumber daya moneter yang diamati oleh suatu organisasi pemerintahan dalam suatu jangka waktu". meningkatkan Untuk mendukung pentingnya rencana belanja, laporan ini akan menunjukkan berapa banyak angka yang telah dicapai dalam mencatat target yang telah dilaksanakan dan disetujui oleh parlemen dan pemerintah sesuai dengan peraturan dan kebijakan terkait.

## 2.6 Efektivitas

Ini tentang penegasan Mardiasmo bahwa "pada hakikatnya kelayakan berkaitan dengan pencapaian tujuan atau sasaran strategis (utilitas)" (2018:166). Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau spesifikasi yang diinginkan. Latihan fungsional menarik jika arah gerakan mencapai target strategi (konsumsi yang masuk akal). Sebuah klub dianggap sangat lari jika berhasil mencapai tujuannya. Sebuah klub atau program akan dianggap meyakinkan jika hasil yang sebenarnya dipandang sebagai tujuan dan dapat diamati dengan bijaksana dan tepat. Seperti yang ditunjukkan oleh Mahsun (2016:85), tingkat kredibilitas dari pilihan yang direkomendasikan adalah

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Hasil retribusi kemudian dipartisi menjadi beberapa nilai manfaat. Menimbang Pengumuman Gerejawi Usaha Keluarga No. 13 Tahun 2006, hasil kesepakatan agregat dikelompokkan menjadi beberapa tingkatan sebagai berikut:

2  
**Tabel 1 Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan**

Efektivitas (%)	Keterangan
>100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

## 2.7 Efisiensi

Pada 2018:165, Mardiasmo menyatakan, Kemungkinan efisiensi erat hubungannya dengan efektivitas. Penilaian viabilitas dilakukan dengan memanfaatkan hubungan antara hasil yang

diberikan dan data yang digunakan (biaya hasil). , seseorang dapat berharap bahwa pelaksanaan atau hasil pekerjaan tertentu dapat dicapai (dengan upaya luar biasa) dengan menggunakan sarana dan aset yang dapat diabaikan.

Menurut Mahsun (2016: ), tingkat kemahiran resep: 84) adalah:

$$Efisiensi = \frac{Realisasi\ Belanja}{Anggaran\ Belanja} \times 100\%$$

36 Kemudian, hasil laju disusun menjadi beberapa tingkat efisiensi. Menimbang Pernyataan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, hasil tarif diminta menjadi beberapa tingkatan sebagai berikut:

2  
**Tabel 2 Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan**

Efisiensi (%)	Keterangan
>100%	Tidak Efisien
90%-100%	Kurang Efisien
80%-90%	Cukup Efisien
60%-80%	Efisien
<60%	Sangat Efisien

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

## 2.8 Penelitian Terdahulu

Menimbang penelitian yang dikoordinir oleh Evita Febriani (2021) dengan judul “Penilaian Target dan Penegasan Penyelenggaraan Pembayaran dan Pemanfaatan Keuangan Lingkungan Pemerintahan Pemerintahan Magelang” Kajian ini memisahkan antara tujuan dan penegasan pengaturan pembayaran dan penggunaan uang lumrah di Kabupaten Magelang. Pemerintah Teritorial. Penyelesaian penelitian ini adalah bahwa sesuai dengan tujuan penyelidikan yaitu untuk memilah bagaimana kondisi tujuan dan penegasan kompensasi dan pemanfaatan umum (APBD) Kota Magelang Putus menunjukkan bahwa upah lingkungan dari pemerintah Sistem Magelang sudah mulai sangat baik dalam mengenalinya. Dengan mempertinggi dan meningkatkan gaji daerah, menggarap sifat SDM, dan mengembangkan pondasi lebih lanjut, Pemerintah Daerah Rezim Magelang berupaya untuk mencapai dan menaikkan gaji provinsi. Kemudian, belanja daerah dipusatkan pada belanja daerah yang terkait langsung dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dengan menumbuhkan pintu masuk bisnis yang terbuka, mengurangi tingkat kemiskinan dan mengurangi varietas dalam kegiatan organisasi publik. antar daerah. Ulasan ini dan yang sebelumnya memiliki kesamaan berikut:

1. Nyatakan upah dan konsumsi sebagai faktor bebas yang digunakan.
2. Strategi penelitian menggunakan investigasi subyektif grafis.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, yang satu ini:

1. Dalam studinya, Evita Febriani (2021) menyelidiki kelayakan pembayaran dan penggunaan intrastate. Sebagai bagian dari pemeriksaan akhir, penyelidikan tentang manfaat dan kelayakan pembayaran dan penggunaan lingkungan dilakukan.

## 1 3. Metode Penelitian yang Digunakan

Strategi pengintaian penelitian ini meng<sup>31</sup>ungkan metode pengintaian objektif dengan metode penelitian informatif. Strategi investigasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang perkembangan pemeriksaan yang diarahkan oleh pembuat.

### 3.1 Sumber Data

Mengklasifikasikan informasi memanfaatkan hotspot informasi utama dalam penelitian ini. Sugiyono berpendapat bahwa “sumber substansial” adalah “sumber yang memberikan informasi langsung kepada badan intelijen” (2018:376). Satu afiliasi (BPKAD) telah mencirikan profil pengakuan rencana pengeluaran dalam peraturannya. Informasi tersebut merinci tingkat kemampuan dan kelangsungan rencana pengeluaran pendapatan dan konsumsi provinsi Garut, serta kondisi sebenarnya dari pengakuan dan pelaksanaan rencana keuangan di lapangan. Informasi penting juga diperoleh dari kantor-kantor pemerintah.

- Pelaksanaan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perda Garut Badan Pengelola Keuangan Provinsi (BPKAD).
- Badan Pengawasan Sumber Daya Keuangan Daerah (BPKAD) Informasi desain hirarki Garut, penilaian praktik, dan pengesahan rencana pemanfaatan.

### 21 3.2 Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan metode pengumpulan data berikut untuk mengumpulkan informasi untuk penelitian ini: Eksplorasi Pustaka, Eksplorasi Lapangan, Pertemuan, Dokumentasi

## 4 Analisis Deskripsi Variabel Penelitian Pendapatan Daerah Kabupaten Garut

### 4.1 Analisis 16 Efektivitas

Sumber-sumber di dalam wilayahnya sendiri yang dihirisun dengan berpedoman pada pedoman provinsi sesuai dengan peraturan dan pedoman materiil. Karena melalui sektor ini dapat dilihat seberapa jauh suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah, maka sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting. Karena ketersediaan data, studi ini hanya memasukkan pendapatan dari sub-anggaran berikut:

- Pendapatan asli daerah yang terdiri dari: Pendapatan dari pajak daerah; Pendapatan Balas Dendam Provinsi; Penghasilan dari Kelimpahan Provinsi Terpencil Para eksekutif; dan PAD Tambahan yang Sah;
- Penyesuaian cadangan yang meliputi: Dana bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak; Aset Penetapan Umum; selanjutnya, Aset Penjatahan Luar Biasa; selanjutnya
- pembayaran wilayah lain yang sah, misalnya Pendapatan dari hibah; dana dari pemerintah provinsi dan daerah lain untuk bagi hasil pajak; Bantuan keuangan; dan Dana Lain untuk Transfer

Berdasarkan laporan realisasi anggaran yang diperoleh dari Badan Anggaran dan Sumber Daya Daerah (BPKAD) Perda Garut, dapat kita lihat cara garis besar laporan realisasi anggaran dan realisasi pendapatan provinsi untuk Rezim Garut tahun 2016-2019, sebagai berikut:

Peneliti menyajikan anggaran pendapatan dan realisasi anggaran per pos anggaran pada tabel berikut:

**Tabel 3 Ringkasan Laporan Anggaran dan Realisasi Per Pos Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016-2019**

No	Uraian	Anggaran Pendapatan			
		2016	2017	2018	2019
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>				
	Pendapatan Pajak Daerah	84.263.693.608,00	119.976.840.367,00	132.572.208.440,00	145.576.000.000,00
	Pendapatan Retribusi Daerah	15.447.211.627,09	21.105.378.522,00	21.456.157.762,00	21.934.068.042,00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.553.583.293,60	5.867.341.572,17		5.679.619.287,00
	Lain-lain PAD Yang Sah	322.601.410.903,66	568.006.336.158,00	1.531.482.545,00	328.057.489.022,00

No	Uraian	Realisasi Pendapatan			
		2016	2017	2018	2019
4.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>				
	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan	128.275.879.000,00	207.579.162.842,00	177.613.239.000,00	197.027.408.657,00
	Dana Alokasi Umum	1.808.709.871.000,00	1.776.936.655.000,00	1.776.936.655.000,00	1.837.050.436.000,00
	Alokasi Khusus	696.429.868.800,00	708.973.063.000,00	690.598.890.000,00	767.510.693.000,00
	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>				
4.3	Dana Hibah	23.000.000.000,00	143.667.000.000,00	290.355.237.779,00	297.936.223.000,00
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	97.916.707.894,00	191.868.145.886,00	200.220.988.371,00	205.368.235.720,00
	Bantuan Keuangan	417.512.844.370,00	363.733.200.000,00	346.691.836.600,00	507.425.836.846,00
	Dana Transfer Lainnya	420.287.125.654,00		422.052.659.558,00	517.089.793.622,00
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	385.312.223.031,89	692.255.365.083,00	421.299.024.535,00	486.565.326.730,00
	Pendapatan Pajak Daerah	83.398.777.015,00	113.025.412.527,00	128.132.223.278,00	131.675.124.090,00
	Pendapatan Retribusi Daerah	17.716.949.504,00	15.506.399.384,00	22.839.731.670,00	17.001.093.720,00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.510.715.914,00	5.867.341.588,00		5.679.619.287,00
	Lain-lain PAD Yang Sah	278.685.780.598,89	557.856.211.584,00		332.209.489.633,00
4.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>				
	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan	156.164.744.174,00	198.809.493.646,00	189.818.274.124,00	288.321.148.971,00
	Dana Alokasi Umum	1.808.709.871.000,00	1.776.936.655.000,00	1.776.936.655.000,00	1.837.050.436.000,00
	Alokasi Khusus	505.214.401.666,00	683.363.164.345,00	658.897.211.119,00	717.982.224.675,00
	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>				
4.3	Dana Hibah	18.998.000.000,00	143.667.000.000,00	284.286.235.000,00	296.337.644.761,00
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	95.917.571.656,00	191.816.104.886,00	196.268.282.972,00	209.827.893.837,00
	Bantuan Keuangan	358.096.736.355,00	336.844.555.675,00	338.612.363.376,00	430.800.981.442,00
	Dana Transfer Lainnya	420.561.676.828,00		435.225.469.085,00	527.950.673.084,00

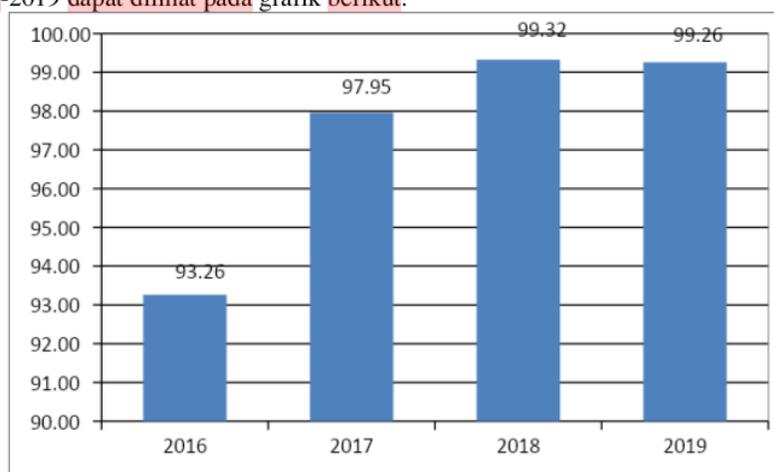
Dari tabel diatas, dihitung tingkat efektivitasnya baik secara umum pada masing-masing tahun, maupun secara khusus dihitung pula tingkat efektivitas tiap sub anggaran sebagai berikut:

**Tabel 4 Ringkasan Hasil perhitungan tingkat Efektivitas Laporan Anggaran dan Realisasi Per Pos Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016-2019**

No	Uraian	2016		2017		2018		2019	
		Efektivitas	Kriteria	Efektivitas	Kriteria	Efektivitas	Kriteria	Efisiensi	Kriteria
1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	90,05	Efektif	96,82	Efektif	98,02	Efektif	97,07	Efektif
	Pendapatan Pajak Daerah	98,97	Efektif	94,21	Efektif	96,65	Efektif	90,45	Efektif
	Pendapatan Retribusi Daerah	114,69	Sangat Efektif	73,47	Kurang Efektif	106,45	Sangat Efektif	77,51	Kurang Efektif
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	99,23	Efektif	100,00	Sangat Efektif			100,00	Sangat Efektif
	Lain-lain PAD Yang Sah	86,39	Cukup Efektif	98,21	Efektif			101,27	Sangat Efektif
2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	93,64	Efektif	98,72	Efektif	99,26	Efektif	101,49	Sangat Efektif
	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	121,74	Sangat Efektif	95,78	Efektif	106,87	Sangat Efektif	146,34	Sangat Efektif

27	Dana Alokasi Umum	100,00	Sangat Efektif						
	Dana Alokasi Khusus	72,54	Kurang Efektif	96,39	Efektif	95,41	Efektif	93,55	Efektif
	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	93,21	Efektif	96,15	Efektif	99,61	Efektif	95,88	Efektif
26	Pendapatan Hibah	82,60	Cukup Efektif	100,00	Sangat Efektif	97,91	Efektif	99,46	Efektif
3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	97,96	Efektif	99,97	Efektif	98,03	Efektif	102,17	Sangat Efektif
	Bantuan Keuangan	85,77	Cukup Efektif	92,61	Efektif	97,67	Efektif	84,90	Cukup Efektif
	Dana Transfer Lainnya	100,07	Sangat Efektif			103,12	Sangat Efektif	102,10	Sangat Efektif
	<b>Total</b>	<b>93,25</b>	<b>Efektif</b>	<b>97,95</b>	<b>Efektif</b>	<b>99,32</b>	<b>Efektif</b>	<b>99,26</b>	<b>Efektif</b>

13  
Untuk lebih jelasnya tingkat efektivitas pendapatan daerah Kabupaten Garut pada tahun 2016-2019 dapat dilihat pada grafik berikut:



**Gambar 1 Tingkat Efektivitas Pendapatan Daerah Kabupaten Garut**

Wawancara dengan Bapak Diky Iman Firmah, SE, Kabid Pelelangan Subsidi Anggaran III mengungkapkan bahwa dalam menghasilkan pendapatan asli daerah Kabupaten Garut dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 akan menghadapi berbagai kendala, antara lain sebagai berikut: peningkatan.

- 1) Kegagalan pemilik usaha untuk melaporkan dan menyerahkan SPTPD (SPT pajak daerah) mereka tepat waktu Hal ini memerlukan strategi penagihan utang untuk pembayaran, yang menunda pendapatan
- 2) Daya beli individu pada dasarnya tidak berkembang seperti sekarang.
- 3) Layanan mengevaluasi pendekatan otoritas publik pada hibah penginapan dan menemukan bahwa biaya tanah dan sewa (BPHTB) yang dibayarkan jauh dari ideal dibandingkan dengan rumah dengan biaya transaksi yang tidak terbatas.
- 4) Di daerah-daerah di mana formulir pengeluaran dua kali lipat dan TO (tidak ada artikel) untuk perusahaan publik dan sosial masih banyak, penyegaran informasi yang relevan diperlukan. Ini membingungkan angsuran properti dan biaya bangunan di wilayah metropolitan dan pedesaan (PBB-2).

- 5) Tidak adanya kantor yang diberikan oleh DPRD untuk membantu peningkatan pelaksanaan pembalasan lokal, termasuk efek penggunaan wilayah lokal dan eksekutif sumber daya lingkungan. Ini karena infrastruktur lokal sudah rusak atau belum tersedia.
- 6) Pengaruh bekerja pada ekonomi global pada pendapatan pemerintah pusat akan mempengaruhi presentasi persyaratan pendapatan lokal untuk proyek koordinasi semacam ini
- 7) Penundaan keputusan perubahan APBD Jabar 2019 yang berdampak pada osmosis pedoman moneter dari pemerintah daerah Jabar

Upaya pemerintah sistem Garut untuk menyelesaikan persoalan substansi daerah organisasi Garut:

- 1) Mengotorisasi dan membayar biaya terdekat untuk membuat dan melaksanakan sistem yang memadai secara luas yang sepenuhnya berpusat pada memajukan iklim bisnis dan teknik yang membantu menciptakan dan meningkatkan pendapatan pengeluaran.
- 2) Upaya dilakukan untuk mengumpulkan data tentang bidang kewajiban baru untuk memenuhi tujuan penilaian.
- 3) Meningkatkan kepuasan kantor dan kerangka kerja yang dibutuhkan pemerintah daerah untuk membantu mereka memenuhi tanggung jawab teritorial mereka, termasuk langkah-langkah untuk mengontrol bagaimana masyarakat lokal menggunakan sumber daya negara.
- 4) Idealnya, Anda harus mencoba memastikan bahwa karyawan yang bertugas mengelola pendapatan menerima pelatihan pengembangan keterampilan dan persiapan praktis untuk membantu menegakkan undang-undang pengupahan khusus negara.
- 5) Lebih membina asosiasi dengan PPAT/CPA dan PPATS untuk uang muka dan BPHTB serta menjamin keaslian valuasi perdagangan.
- 6) Ada pekerjaan provinsi yang luas tentang pentingnya angsuran tanah dan biaya pemajuan tanah metropolitan (PBB-P2) kepada pemilik perkebunan RT/RW penduduk metropolitan

#### 4.1 Analisis Efisiensi

Efisiensi sangat erat kaitannya dengan kompetensi. Sebuah klub, program, atau gerakan harus dapat mencapai hasil tertentu dengan jumlah data yang paling tidak mungkin, atau hasil yang paling ekstrim (dengan usaha yang luar biasa) menggunakan sumber data tertentu. seharusnya mahir. Kemahiran dapat dievaluasi menggunakan pengakuan pengeluaran dan korelasi rencana keuangan pengeluaran. Hasil rate kemudian dipartisi menjadi beberapa level produktivitas. Menimbang Pengumuman Gerejawi Usaha Keluarga No. 13 Tahun 2006, hasil kesepakatan agregat dikelompokkan menjadi beberapa tingkatan sebagai berikut:

Estimasi diatas menunjukkan pameran dalam melaksanakan rencana pengeluaran sadar penggunaan aturan Galut dari 2016 hingga 2019, mengungkap langkah-langkah yang kurang menarik. Untuk menentukan rencana keuangan konsumsi pedesaan Garut Rule, informasi 34 si terlampir tentang rencana penggunaan keuangan provinsi dan pengakuan dari 2016 hingga 2019 disajikan pada tabel di bawah ini

12  
**Tabel 5 Analisis Efisiensi Pelaksanaan Anggaran dan Realisasi  
Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016-2019**

Tahun	Anggaran	Realisasi	Efisiensi	Kriteria Efisiensi
2016	4.046.134.278.152,35	3.691.518.655.216,00	91,24	Kurang Efisien
2017	2.926.495.065.694,96	4.369.933.640.924,00	149,32	Tidak Efisien
2018	4.527.006.943.984,00	4.257.224.285.897,00	94,04	Kurang Efisien
2019	3.273.266.502.865,14	4.594.611.035.095,00	140,37	Tidak Efisien

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut, data diolah kembali 2022

Dari tahun 2016 hingga 2019, kemampuan eksekusi RAPBD Perda Garut berubah secara konsisten, dengan prinsip efektivitas rendah seperti yang ditampilkan pada Tabel 5. Terlebih lagi, para analis mengeksplorasi seberapa efektif pelaksanaan APBD Provinsi Garut berbasis RAPBN. . Perencanaan keuangan studi ini secara khusus mempertimbangkan dua perspektif tentang kendala saat ini: belanja langsung dan belanja situasional. Pengeluaran bundaran mencakup rencana pengeluaran bersponsor, misalnya, biaya staf, biaya sumbangan, biaya bantuan pemerintah, biaya pembagian manfaat pemerintah negara bagian/kota/kota, alokasi penghargaan pemerintah metropolitan/kabupaten/kota/partai, dan biaya tak terduga. termasuk. Ini termasuk biaya modal, barang dan jasa, dan tenaga kerja dari perspektif konsumsi yang disesuaikan.

Lebih bermuansa, mengingat rencana under financial para peneliti, inilah kuatnya belanja negara dalam aturan Galut untuk periode 2016-2019:

**Tabel 6 Rekapitulasi Hasil Penitugan Tingkat Efisiensi Tiap Sub Anggaran Tahun 2016-2019**

No	Uraian	2016		2017		2018		2019	
		Efisiensi	Kriteria	Efisiensi	Kriteria	Efisiensi	Kriteria	Efisiensi	Kriteria
1.	BELANJA	91,2	Kurang Efisien	149,32	Tidak Efisien	94,04	Kurang Efisien	94,04	Tidak Efisien
a.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	93,0	Kurang Efisien	352,01	Tidak Efisien	96,41	Kurang Efisien	96,41	Tidak Efisien
b.	Belanja Pegawai	92,7	Kurang Efisien	99,39	Kurang Efisien	95,88	Kurang Efisien	95,88	Kurang Efisien
c.	Belanja Hibah	99,0	Kurang Efisien	99,82	Kurang Efisien	90,78	Kurang Efisien	90,78	Kurang Efisien
d.	Belanja Bantuan Sosial	91,0	Kurang Efisien	93,20	Kurang Efisien	89,29	Cukup Efisien	89,29	Sangat Efisien
25	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	100,0	Kurang Efisien	100,00	Kurang Efisien	96,91	Kurang Efisien	96,91	Cukup Efisien
5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	94,3	Kurang Efisien	99,92	Kurang Efisien	99,99	Kurang Efisien	99,99	Kurang Efisien
2.	Belanja Tidak Terduga	39,1	Sangat Efisien	35,94	Sangat Efisien	35,99	Sangat Efisien	35,99	Sangat Efisien
a.	BELANJA LANGSUNG	88,8	Cukup Efisien	88,13	Cukup Efisien	91,20	Kurang Efisien	91,20	Cukup Efisien
b.	Belanja Pegawai	94,2	Kurang Efisien	92,71	Kurang Efisien	94,12	Kurang Efisien	94,12	Kurang Efisien
c.	Belanja Barang dan Jasa	91,5	Kurang Efisien	86,85	Cukup Efisien	91,53	Kurang Efisien	91,53	Kurang Efisien
1.	Belanja Modal	84,5	Cukup Efisien	89,36	Cukup Efisien	89,63	Cukup Efisien	89,63	Efisien

Secara umum, dengan mempertimbangkan Tabel 6 di atas, pengakuan Tata Kelola Wilayah Perbup Garut 2016 hingga 2019 dinilai tidak efisien pada 2016 dan 2018, serta tidak efisien pada 2017 dan 2019. Jelas didelegasikan, tetapi lebih dekat pemeriksaan semua aspek rencana sub-pengeluaran mengungkapkan berbagai tingkat kompetensi untuk masing-masing. Untuk tugas keuangan lain yang benar-benar ditugaskan, terutama tugas keuangan penggunaan langsung, hanya saja batas pengaturan sub-penggunaan sehubungan dengan penggunaan staf, pekerjaan, dan penggunaan item bahkan lebih rendah. Rencana sub-moneter lainnya sampai saat ini didelegasikan kurang bermanfaat sejauh kepegawaian dan penggunaan modal. Sebagian besar rencana keuangan

bersponsor lainnya kurang layak, terutama yang berkaitan dengan pengeluaran untuk dana abadi, pembagian keuntungan, dan bantuan keuangan.

### Gambar 2 Tingkat Efisiensi Belanja Daerah Kabupaten Garut

Mencermati hasil silaturahmi dengan Bapak Diky Iman Firmansyah, SE, Kepala Bidang Penataan III Tawaran Unggulan, beberapa hal berikut ini berawal dari ketidakberdayaan organisasi Garut untuk melihat penggunaan terdekat pada tahun 2016-2019: ada beberapa masalah.

- 1) Pemanfaatan yang tidak tepat dari cadangan pemerintah terdekat (baik penggunaan langsung maupun tidak langsung).
- 2) Memikirkan kewajaran dalam keluarga para eksekutif.
- 3) Masalah yang terjadi selama tahap perolehan.
- 4) Struktur, jalan, bentang, dan peningkatan lainnya dengan siklus akuisisi yang panjang (kronik yang sangat definitif, KAK, Puncak, RAB, dll.).
- 5) Pemutakhiran laporan rencana pengeluaran, termasuk pertukaran antara kegiatan yang berbeda, misalnya bidang rencana pengeluaran, unit otoritas, dan sebagainya.

Pemerintah Garut Berupaya Atasi Masalah Belanja Negara Pemerintah Garut:

- 1) Lengkapi struktur survei rencana keuangan.
- 2) Meneliti sebagian besar riwayat pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan belanja K/L.
- 3) Tingkatkan kapasitas SDM untuk mengawasi rencana keuangan dan membeli tenaga kerja dan produk.

## 5 Penutup

Dengan mempertimbangkan hasil ikhtisar dan efek lanjutan dari pertemuan tersebut, kami memperoleh hasil yang menyertainya.

Pengesahan RAPBN Garut Kur Tahun 2016-2019 dikatakan membuahkan hasil. Dalam hal pengelolaan properti daerah perorangan dan pendapatan PAD sah lainnya, sub-anggaran dari pendapatan asli daerah dianggap efektif. Ini berfungsi secara mengagumkan dengan rencana sub-keuangan Aset Bayar, terutama yang berhubungan dengan Aset Penghargaan Umum dan Aset Pendukung Penilaian. Rencana kontrol pendapatan khusus negara bagian mengumumkan kemajuan di semua bagian yang terkait dengan cicilan tambahan, pembagian pendapatan, bantuan keuangan, dan penahanan transfer. Pengesahan rencana penggunaan terdekat di bawah aturan Galut dari 2016 hingga 2019 dianggap tidak efisien, terutama dalam rencana kekurangan penggunaan yang menurun, sementara rencana kekurangan bantuan sosial telah ditegur karena pemanfaatan pemanfaatan staf dan biaya klinis. Kuat, dengan pengecualian rencana pengeluaran yang lebih rendah untuk delegasi bantuan keuangan, yang kurang produktif. Secara umum dikatakan bahwa rencana pengendalian pengeluaran yang cepat kurang berguna, Namun hanya karena contoh rencana pengendalian pengeluaran te<sup>33</sup> ditugaskan untuk menjadi mahir. Pemda Kabupaten Garut diharapkan dapat meningkatkan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat <sup>37</sup>am pengambilan kebijakan dan pelaksanaannya guna mencapai tingkat penyerapan anggaran yang efektif dan efisien. Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Garut perlu melakukan evaluasi untuk mengetahui penyebab tidak efektifnya pengakuan rencana belanja pemanfaatan. Asesmen ini mengasumsikan bahwa langkah-langkah untuk secara efektif menyerap rencana belanja negara Pemerintah Garut akan ditingkatkan.

6

### Daftar Pustaka

- Daling M (2013) *Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara*<sup>10</sup>
- Deddi N dan Ayuningtyas H (2016) *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat

Mahsun, M (2016) *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE  
Mardiasmo. (2018) *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

J24022116208

ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://journal.uniga.ac.id">journal.uniga.ac.id</a> Internet Source	3%
2	<a href="http://jurnal.unissula.ac.id">jurnal.unissula.ac.id</a> Internet Source	1%
3	Submitted to Universitas Nusa Cendana Student Paper	1%
4	<a href="http://digilibadmin.unismuh.ac.id">digilibadmin.unismuh.ac.id</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://peraturan.bpk.go.id">peraturan.bpk.go.id</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://123dok.com">123dok.com</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://dspace.uui.ac.id">dspace.uui.ac.id</a> Internet Source	1%
8	<a href="http://www.muaraenimkab.go.id">www.muaraenimkab.go.id</a> Internet Source	1%
9	<a href="http://repository.widyatama.ac.id">repository.widyatama.ac.id</a> Internet Source	1%

10	<a href="https://repository.um-palembang.ac.id">repository.um-palembang.ac.id</a> Internet Source	1 %
11	<a href="https://karyailmiah.uho.ac.id">karyailmiah.uho.ac.id</a> Internet Source	<1 %
12	Helda Marlin Ala, Mesri Welhelmina Nisriani Manafe. "Interaksi Pertimbangan Etika Dan Perilaku Penyusun Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran Pemerintah Daerah", <i>Jurnal Inovasi Kebijakan</i> , 2020 Publication	<1 %
13	<a href="http://www.blitarkab.go.id">www.blitarkab.go.id</a> Internet Source	<1 %
14	<a href="http://www.slideshare.net">www.slideshare.net</a> Internet Source	<1 %
15	<a href="http://eprint.stieww.ac.id">eprint.stieww.ac.id</a> Internet Source	<1 %
16	Submitted to Universitas Papua Student Paper	<1 %
17	<a href="http://vdocuments.site">vdocuments.site</a> Internet Source	<1 %
18	<a href="https://repository.ubharajaya.ac.id">repository.ubharajaya.ac.id</a> Internet Source	<1 %
19	<a href="http://serumpun.babelprov.go.id">serumpun.babelprov.go.id</a> Internet Source	<1 %

20	Submitted to Universitas Brawijaya Student Paper	<1 %
21	idr.uin-antasari.ac.id Internet Source	<1 %
22	ppid.banjarnegararakab.go.id Internet Source	<1 %
23	trenggalekkab.go.id Internet Source	<1 %
24	wartanews.co Internet Source	<1 %
25	banyuwangikab.go.id Internet Source	<1 %
26	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
27	repository.unja.ac.id Internet Source	<1 %
28	Feisi Ninsi Prong, Robert Lambey, Lady D. Latjandu. "Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Kepulauan Sangihe", Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 2023 Publication	<1 %
29	core.ac.uk	

Internet Source

<1 %

30

[ejournal.unsrat.ac.id](http://ejournal.unsrat.ac.id)

Internet Source

<1 %

31

[pdfs.semanticscholar.org](http://pdfs.semanticscholar.org)

Internet Source

<1 %

32

[www.nttonlinenow.com](http://www.nttonlinenow.com)

Internet Source

<1 %

33

[docplayer.info](http://docplayer.info)

Internet Source

<1 %

34

[erepo.unud.ac.id](http://erepo.unud.ac.id)

Internet Source

<1 %

35

[eprints.iain-surakarta.ac.id](http://eprints.iain-surakarta.ac.id)

Internet Source

<1 %

36

[es.scribd.com](http://es.scribd.com)

Internet Source

<1 %

37

[fpmhdunud28.blogspot.com](http://fpmhdunud28.blogspot.com)

Internet Source

<1 %

38

[pascasarjanafe.untan.ac.id](http://pascasarjanafe.untan.ac.id)

Internet Source

<1 %

39

[xcontohmakalah.blogspot.com](http://xcontohmakalah.blogspot.com)

Internet Source

<1 %

---

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off